

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT)

Oleh: Yana Sahyana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This study aimed to describe Role of Village Government in Empowering Village Sukamulya Pakenjeng Sub district Garut District, based on the fact, most of livelihood's Sukamulya Villagers is farm and level of public education in the productive age tends to below. In this study the authors use descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques were observation interviews and documentation. Based on the research that has been done can be concluded that the village government of Sukamulya can empower people through several development program are; The first is activation of the institution, the second is increasing public participation in the implementation of communal work activities, the rsse village musrenbangdes and physical development. The third is increase in productive economic with activity training of black smiths and embroidery. But, in the implementation of an empowerment society, village government Sukamulya had some constrains such as lack of community participation, lazy culture and the of facilities available to support development activities.

Keywords: empowerment, village government.

PENDAHULUAN

Amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Oleh sebab itu pembangunan perdesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan

merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah peran Pemerintah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, secara geografis Desa Sukamulya di wilayah selatan yang mempunyai potensi cukup strategis dengan luas wilayah 716 hektar. Jumlah penduduk 5495, jumlah KK 1689, dengan mata pencaharian sebagian penduduknya petani sebanyak 645 KK dan jumlah buruh tani sebanyak 858 KK. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya seluas 512 hektar digunakan sebagai lahan pertanian.

Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Berdasarkan data potensi desa tahun 2012 menunjukkan masyarakat yang berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 86 KK sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di desa Sukamulya 100 KK, melihat banyaknya pengangguran di desa tersebut, maka peran pemerintah Desa Sukamulya untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan program pemberdayaan, yang salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan secara langsung masyarakat Desa Sukamulya, sebagai pembinaan dan pengkoordinasikan jalannya roda pemerintahan, maka pemerintah Desa Sukamulya melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UKP), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Dengan adanya peran pemerintah desa tersebut pada tahun 2014 Desa Sukamulya masuk dalam seleksi lokasi desa mandiri oleh bidang PKP Bapemas Provinsi Jawa Barat.

Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, pemerintah Desa Sukamulya banyak mengalami kendala-kendala yang salah satunya kurangnya partisipasi dan budaya malas yang ada dalam diri masyarakat Desa Sukamulya

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui peran Pemerintah Desa Sukamulya dalam memberdayakan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan

Menurut S.P Siagian (2000: 2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan

perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan menurut Bintoro Tjokroaminoto (2000; 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur *inovatif* (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan ekperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamijoyo, 1971; 195-196), selain itu juga dikatakan bahwa suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas,
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut,
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk menncapai program seefektif mungkin,
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut,
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan lainnya,
6. Berbagai upaya di bidang manajemen, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamijoyo, 1974; 196-197).

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia”

Pemberdayaan

Menurut *Parsons, et, al. 1994* (dalam Suharto, 1997; 210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan, dan memengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi objeknya.

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut *Drijver dan Sajise* (dalam Sutrisno, 2005; 18) ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*), di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan yang berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi,
4. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional,

5. Keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Nazir (1988; 63) bahwa “metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang”

Menurut Koentjoroningrat (1990; 20), bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. 2) Upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. 3) Faktor pendukung dan penghambat dari peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

PEMBAHASAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA

Adapun peran dari Pemerintah Desa Sukamulya dalam memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut.

Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam pemerintahan desa, Kepala Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bekerja sama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa, upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Sukamulya dengan LPM dan BPD dalam menyusun rencana pembangunan akan menghasilkan sebuah kebijakan, sebagai berikut.

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK,
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan,
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada SDM,
4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksanaan Program

Pemerintah Desa Sukamulya sebelum membuat program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang tujuannya untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, kemudian dilanjutkan pada musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Sukamulya.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat menurut *Drijver dan Sajise* (dalam Sutrisno, 2005; 18) peran pemerintah Desa Sukamulya dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama, yaitu menekankan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Sukamulya bisa membuka kesempatan kepada masyarakat Desa Sukamulya untuk terlibat dalam menggali gagasan, sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi *sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi* hasil kegiatan yang ada di lapangan.

Berikut program-program pembangunan masyarakat Desa Sukamulya pada periode tahun 2009-tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Pengaktifan kelembagaan UPK,

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kerja bakti,
 - b. Musrenbang des,
 - c. Perlombaan desa,
 - d. Pembangunan fisik.
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan pembuatan pande besi,
 - b. Pelatihan keterampilan border

Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina

Kepala Desa Sukamulya mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat Desa Sukamulya mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut *United Nations* (1956; 83-92, dalam Tampubolon, 2006) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat, dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya, berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah Desa Sukamulya dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan berbagai bidang sehingga diharapkan nantinya masyarakat Desa Sukamulya tidak terjatuh ke dalam posisi semakin lemah dan terpinggirkan. Pemerintah Desa Sukamulya secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembinaan dalam Bidang Ekonomi

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Sukamulya bekerja sama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok serta perbaikan irigasi, pemberantasan hama, dan diberi kemudahan dalam permodalan melalui dana perkeriditan rakyat yang dikelola oleh UPK yang ada di

Desa Sukamulya sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk dan obat pertanian.

2. **Pembinaan dalam Bidang Kesehatan.**

Kegiatan posyandu yang ada di Desa Sukamulya berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap sebulan sekali di 6 posyandu di tiap dusun sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 2 bulan sekali hal ini dikarenakan posyandu lansia hanya berjumlah 1 tepatnya di dekat desa. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, anak-anak balita dan lansia juga mendapat pengobatan gratis.
3. **Pembinaan dalam Bidang Keagamaan**

Pemerintah Desa Sukamulya bersama LPM melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Sukamulya melalui kegiatan rutin seperti jemaah tahlil, jemaah khataman, jemaah yasinan yang dilakukan setiap minggu sekali di bale Desa Sukamulya sehingga hubungan kekerabatan silaturahmi dapat terjalin dengan penuh rasa kekeluargaan.
4. **Pembinaan dalam Bidang Kepemudaan**

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali di bale Desa Sukamulya yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Garut, dengan adanya kerja sama dengan BNN maka masyarakat Desa Sukamulya dapat pengetahuan tentang bahaya narkoba serta turut serta dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika ataupun penyalahgunaan Psikotropika di Desa Sukamulya.
5. **Pembinaan dalam Bidang Pendidikan**

Pemerintah Desa Sukamulya telah melakukan pembinaan di bidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal kelas PAUD Al-Hikmah yang ada di

dusun satu, selain itu Pemerintah Desa Sukamulya dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat tidak mampu sehingga dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah Desa Sukamulya turut berperan aktif.

6. **Pembinaan dalam Bidang Keamanan**

Pemerintah Desa Sukamulya dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang keamanan terbukti dengan diadakannya siskamling setiap hari di mana setiap KK mendapat giliran 1 kali dalam seminggu, seandainya ada warga yang tidak dapat hadir maka akan menggantinya pada minggu selanjutnya dan tidak boleh diwakilkan. Kondisi sebelumnya sering terjadi pencurian sepeda motor bahkan ternak besar seperti sapi atau kerbau, tapi setelah adanya siskamling serta koordinasi dengan desa lain, maka kondisi keamanan semakin kondusif termasuk bagi setiap tamu yang lebih dari 1x 24 jam diwajibkan lapor diri bersama tuan rumah kepada RT dan RW.

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA

Pemerintah Desa Sukamulya beserta LPM dan BPD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mengembangkan peran serta masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga desa dengan menetapkan program-program pemberdayaan sebagai berikut.

Pengaktifan Kelembagaan UPK

Pemerintah Desa Sukamulya memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK, di mana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa, dengan aktifnya lembaga UPK yang ada di Desa Sukamulya, masyarakat tersebut tidak susah-susah mencari modal ketempat lain apalagi ke rentenir. Sebelum aktifnya lembaga UPK

banyak masyarakat yang membutuhkan modal datang ke tempat lain menggadaikan tanah dengan bunga lebih tinggi bahkan kerentener.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa Sukamulya dalam meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Kerja Bakti

Pelaksanaan kerja bakti dan gotong royong yang ada di Desa Sukamulya dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya pada hari minggu, sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan kepala dusun, RT, RW, BPD dan LPM, dari kegiatan tersebut Kepala Desa menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir setiap kegiatan tersebut, dengan kegiatan tersebut akan menyatukan setiap warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut secara aktif dalam mmenciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

2. Perlombaan Desa

Dengan mengikuti lomba desa yang diselenggarakan oleh BKM Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukamulya mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa, penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui kegiatan gotong royong.

3. Musrenbangdes

Pemerintah Desa Sukamulya menetapkan program-program pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, ketua LPM, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang sudah disusun.

4. Pembangunan Fisik

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sukamulya sumber pembiayaannya sebagian besar dari pemerintah pusat berupa Dana Desa, dan sebagian lagi berasal dari alokasi dana desa (ADD) serta dari swadaya masyarakat desa. Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi perbaikan irigasi, perbaikan jembatan, dll. dalam pembangunan fisik pemerintah Desa Sukamulya bekerja sama dengan LPM dan BPD dan Kaur pembangunan serta pendampingan desa untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya masyarakatpun terjun langsung terlibat dalam pembangunan fisik setelah adanya keterbukaan dari aparat desa itu sendiri terutama yang menyangkut anggaran.

Peningkatan Ekonomi Produktif.

Untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Sukamulya mengalami banyak kendala seperti keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM, maka pemerintah desa bbekkerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam memberikan pelatihan-pelatihan (Bintek) kepada masyarakat desa. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan oleh pihak SKPD ke masyarakat Desa Sukamulya adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan Pande Besi

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberian pelatihan yang salah satunya adalah pelatihan pande besi yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Pertanian dalam pembuatan pisau, golok, cangkul, garpu dengan kualitas baik serta model-model yang dapat mmeningkatkan harga jual. Hal ini sangat baik dan disambut oleh masyarakat Desa Sukamulya hal ini dapat ditunjukkan adanya peningkatan jumlah pengrajin pande besi pada tahun 2009 berjumlah 2 pengrajin, pada tahun 2013 sudah 12 orang pengrajin dan pada tahun 2016 sudah mencapai

29 orang pengrajin dan pemerintah Desa Sukamulya memberikan kemudahan kepada pengrajin dalam pemasarannya, yaitu melalui UPK, bazaar-bazar berupa pameran di tingkat kabupaten.

2. Pelatihan Bordir

Pelatihan membordir yang ada di Desa Sukamulya semakin meningkatkan sumber daya masyarakat desa, hal ini terbukti semakin banyaknya pengrajin border yang ada di Desa Sukamulya semakin tahun semakin meningkat jumlahnya dengan 115 pengrajin, dengan adanya kegiatan pengrajin diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa khususnya kaum ibu-ibu, selain itu juga Pemerintah Desa Sukamulya memberikan kemudahan kepada pengrajin border dalam menampung hasil kerajinan untuk dipasarkan melalui Koperasi, bazar-bazar dan pameran-pameran di tingkat kabupaten.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA

Terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi Pemerintah Desa Sukamulya dalam memberdayakan masyarakat Desa Sukamulya dalam memberdayakan masyarakat, yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran Pemerintah Desa Sukamulya adalah sebagai berikut.

1) Kerja sama

Kerja sama Pemerintah Desa Sukamulya dengan pihak swasta dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan dari pihak pemerintah desa dan dari pihak swasta, yaitu mendorong untuk memberikan lingkungan kondusif sebagai desa tujuan investasi dan tentunya akan menyerap tenaga kerja yang berdampak akan mengurangi pengangguran, peran pemerintah desa akan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2) Anggaran (dana)

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Sukamulya, dengan adanya anggaran yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Sukamulya cepat terealisasi salah satunya adalah pembangunan drainase yang ada di Dusun dua yang mana sumber dananya dari APBN sebesar Rp 110.000.000,- dan sebagian dana berasal dari swadaya masyarakat berjumlah Rp 9.000.000,- dengan adanya dana tersebut maka pembangunan sarana drainase yang ada di Dusun dua cepat terealisasi dan sesuai dengan target yang direncanakan.

FAKTOR PENGHAMBAT

Faktor penghambat peran Pemerintah Desa Sukamulya dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Sukamulya tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat yang kurang peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat.

2) Budaya Malas.

Pemerintah Desa Sukamulya telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan membordir, dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan mendesain, memadukan benang, manajemen pemasaran produksi serta pemotongan busana, akan tetapi masih ada dari sebagian kecil masyarakat yang belum bisa mempraktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik mengurus anak maupun membantu suami di sawah.

3). Ketersediaan Fasilitas.

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun

penyuluhan pertanian seperti seperangkat computer, LCD, white boor, Proyektor penyuluhan serta tempat duduk yang masih belum memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Sukamulya menjadi terhambat dan kurang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Sukamulya telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan masuknya Desa Sukamulya dalam seleksi desa mandiri pada tahun 2015, hal ini dapat dilihat melalui *Pertama* sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain; mengaktifkan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif. *Kedua*, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang keamanan serta bidang kepemudaan. Melalui program-program tersebut pemerintah Desa Sukamulya bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
2. Pemerintah Desa Sukamulya mempunyai kerja sama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sukamulya. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sukamulya, yaitu partisipasi masyarakat dirasakan masih perlu pendekatan, budaya malas dari masyarakat perlu mendapat perhatian serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga menjadi terhambatnya sebagian dari program pemberdayaan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan*, Available from; <http://bapenas.jabarprov.go.id/index.php/program-pkp/271-pengembangan-desa-mandiri-berbasis-kawasan-perdesaan>>Accessed 14 Maret 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Penerbit Gramedia, 1990.
- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Paul, Samuel, *Community Participation in Development Projects-The Word Bank Experience*. Washinton DC, The Word Bank. 1987.
- Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strategi*, Jakarta; Penerbit Gunung Agung, 2007.
- Sukarto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung; Penerbit Refika Aditama, 2006.
- Sutrisno, D, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Pakenjeng Kabupaten Garut*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Tjokroamijoyo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta; Penerbit Gramedia, 2005.
- , *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta; LP3ES, 1974.
- Tampubolon, Mangatas, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, Available From: <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/23/pendidikan-pola-pemberdayaan-mas.htm>. 13 Maret 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Widjaja, AW, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PASCAPENATAAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Dedi Kusmana dan H. Basuki Rachmat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

In line with the policy of regional autonomy in Law No. 23 of 2014, on Regional Government, explicitly gives wide autonomy to local governments to manage and manage the various interests and welfare of local communities. With regard to it, the implementation of regional autonomy policy has encouraged a change that is in the order of local governance.

One of the most fundamental and essential changes concerning the status, duties and functions of sub-districts which previously constituted a territorial apparatus within the framework of deconcentration, changed its status to a regional apparatus in the framework of the principle of decentralization. As a regional apparatus, the sub-district heads in carrying out their duties are delegated authority and accountable to the bupati/mayor.

Kecamatan headed by subdistrict head (Camat). Kecamatan is a Work Unit of Regional Government as regional technical implementer having certain working area. The subdistrict head (Camat) is a Civil Servant. He receives a salary from the government. In carrying out its duties, the sub-district is assisted by a secretary of the sub-district (sekcam), heads of affairs and heads of sections

According to Government Regulation No. 41 of 2007, the duties of the subdistrict head include:

- 1. Coordinate community empowerment activities*
- 2. Coordinate the effort of organizing peace and public order*
- 3. Coordinate the implementation and enforcement of legislation*
- 4. Coordinate the maintenance of infrastructure and public service facilities*
- 5. Coordinate the implementation of government activities at the sub-district level*
- 6. Fostering the administration of village and/or kelurahan government*
- 7. Carry out community service that becomes the scope of its duties and/or that can not be implemented by village or kelurahan government*

Wanayasa Sub-district is one of the sub-districts of Purwakarta District that have institutional arrangement. In order to improve public service, Post Regulation of Sub-district Institution, Purwakarta regency government conducted standardization policy of service office infrastructure in Wanayasa District. This research uses descriptive method with inductive approach.

Keywords: *effectiveness, service, the district institutions*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah, di mana tersirat di dalam Undang-Undang tersebut daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung

jawab, pelimpahan kewenangan itu sendiri mempunyai konsekuensi logis bagi pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah harus mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber potensi daerah untuk dapat digali dan dikembangkan untuk dapat menjadikan penerimaan yang berkontribusi sebagai pendapatan daerah. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dan esensial yang menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka azas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. dan selain itu juga kecamatan mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Tugas pokok dan fungsi Kecamatan).

Kabupaten Purwakarta, yang lahir berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, SK Wali Negari Pasundan diubah dan ditetapkan Kabupaten Purwakarta dengan wilayah Kewedanaan Purwakarta ditambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur, sehingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. dan masa selanjutnya terjadi penataan wilayah desa, kelurahan pembentukan

kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka pada saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki 183 desa, 9 kelurahan, 8 kemantren dan 17 kecamatan. dari 17 Kecamatan yang ada saat ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Maksud Penelitian

- Maksud penelitian ini dilakukan, peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan di Kecamatan Wanayasa Pasca Penataan Kelembagaan yang dilakukan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mencari data dukung, sejauh mana efektivitas pelayanan yang dilakukan jajaran aparatur kecamatan, pasca penataan kelembagaan di Kecamatan Wanayasa.
2. Untuk mengetahui dan mencari data dukung, sejauh mana kompetensi sumberdaya manusia, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pasca penataan kelembagaan.
3. Untuk mengetahui dan mencari data dukung, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul, dalam pelayanan pasca penataan kelembagaan.

KAJIAN PUSTAKA

EFEKTIVITAS

Secara umum efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf atau tercapainya hasil dan tidak jarang juga sering dikaitkan dengan efisien. Efektivitas yang dikemukakan oleh Nurudin (2007:26) dalam Mutiarin & Zainudin (2014:14-15) adalah:

Efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai tujuan, sementara efisiensi berarti bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan cermat.

Efektif tetapi tidak efisien, berarti dalam mencapai suatu tujuan menggunakan sumber daya yang berlebihan atau biasa disebut

ekonomi biaya tinggi, sementara efisien namun tidak efektif, berarti dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik, namun sasaran tidak tercapai. Efektif lebih mengarah pada pencapaian sasaran, sementara efisiensi mengarah pada kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara baik (tidak berlebih) untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Menurut Robbins dalam Makmur (2008:123)

“Dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas, yaitu: (1) adanya tujuan yang jelas; (2) sumber daya manusia; (3) struktur organisasi; (4) adanya dukungan atau partisipasi masyarakat; dan (5) adanya sistem yang dianut”.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah proses kegiatan yang dilakukan sekelompok orang di dalam melaksanakan kegiatan, dengan berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan awal, sehingga hasilnya dapat terlaksana tepat waktu.

ORGANISASI

Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, di antaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang di dalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa:

“Teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerja sama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerja sama pada setiap individu”.

Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga

sekarang, yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

Menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer tujuan bersama.

Menurut James D Money (1974): organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Charter I Bernard (1938), menulis organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.

Ciri-Ciri Organisasi

1. Mempunyai tujuan dan sasaran;
2. Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
3. Adanya kerja sama dari sekelompok orang
4. Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

Unsur-Unsur Organisasi

Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

- **Man:** (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personnel. Pegawai atau personnel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (*nonmanagement/ workers*). Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (*man power*) organisasi.
- **Kerja sama:** merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk

mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja (workers), secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (man power) organisasi.

- **Tujuan Bersama:** Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (network).
- **Peralatan (Equipment):** Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).
- **Lingkungan (Environment):** Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan. dan juga beberapa tujuan tertentu.

Teori Organisasi Modern

Teori modern ditandai dengan akhirnya gerakan *contingency* yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya "the social psychology of organization" mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika organisasi ingin

tetap bertahan. Teori modern yang kadang-kadang disebut juga sebagai analisis system pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan an saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka.

Sumber: <http://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisasi/>; <http://maliqren.wordpress.com/2011/11/27/ciri-ciri-organisasi/>; dan <http://agungzetiadji.blogspot.com/2012/10/teori-organisasi.html>

PELAYANAN

Pelayanan publik menurut Moenir (Kusniawan 2005:7) adalah:

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan factor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan Implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayanan masyarakat. Pelayanan publik menurut Sinambela dkk (2010:128) adalah:

Sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011:11) adalah: Pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Dimensi Pelayanan

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah atau aparatur pemerintah desa, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan adalah model (*Service Quality*) yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry (Hardiansyah 2011:46-47) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 5 (lima) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut.

1. *Tangibles*, atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu organisasi pemerintahan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik organisasi dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan aparturnya.
2. *Reliability*, atau kehandalan, yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan masyarakat yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua tingkatan lapisan masyarakat tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
3. *Responsiveness*, atau ketanggapan, yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberi pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan masyarakat yang memerlukan

pelayanan menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam pelayanan.

4. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para aparatur pemerintah untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada organisasi. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*), dan sopan santun (*courtesy*).
5. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan berupaya memahami keinginan masyarakat. Di mana suatu organisasi diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan serta, memahami kebutuhan masyarakat secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi masyarakat pengguna pelayanan.

Kemudian dalam Keputusan Menpan Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum menjelaskan bahwa kriteria pelayanan adalah:

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan dan Kepastian
3. Keamanan
4. Keterbukaan
5. Efisien
6. Ekonomis
7. Keadilan yang merata
8. Ketepatan waktu

Dari pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah sebuah proses mekanisme dari unsur aparatur pemerintah kepada masyarakat, di dalam memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat yang bersangkutan, guna memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dapat juga dikatakan pelayanan adalah suatu proses atau mekanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang baik secara pribadi maupun

kelompok untuk memenuhi keinginan dari seseorang atas apa yang dikehendakinya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut Mulyadi (2014:5) “Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”.

Menurut Nasution dan Usman dalam Mulyadi (2014:8) “Penelitian adalah proses mendapatkan solusi dari permasalahan setelah melakukan studi dan analisis dari berbagai faktor”.

Menurut Sugiyono dalam Mulyadi (2014:8) penelitian memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Rasional. yang berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia;
2. Empiris. yang memiliki arti bahwa kegiatan penelitian itu merupakan cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramat oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan; dan
3. Sistematis. Memiliki arti mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
4. Menurut Imam Gunawan (2015:79) “Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan menganalisis data, pada akhirnya akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian”.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dalam meneliti pelaksanaan penataan kelembagaan kecamatan di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Bogdan

dan Taylor dalam Imam Gunawan (2015:82) bahwa:

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Moleong (2011:6) bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Atherton dan Klemmack dalam Soehartono (2011:35) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. dan biasanya penelitian deskriptif ini menggunakan metode survei”.

Ibrahim (2015:59) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

Seiring dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif karena cara yang digunakan untuk meneliti berangkat dari masalah-masalah bersifat empirik untuk pemecahan masalah yang

menyeluruh. Jujun S. Sumantri dalam Mardalis (2010:21) menyatakan bahwa cara berpikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau melalui mana peneliti memperoleh data penelitian. Peneliti harus melakukannya dengan baik mengenai teknik pengumpulan data, karena hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan ilmiah. Proses pengumpulan data yang salah akan memengaruhi jawaban dari masalah penelitian.

Menurut Imam Gunawan (2015:142) prinsip dalam pengumpulan data metode kualitatif, yaitu:

1. Menggunakan multisumber bukti, menggunakan banyak informan dan memerhatikan sumber-sumber bukti lainnya;
2. Menciptakan data dasar studi kasus, mengoordinasikan data yang telah terkumpul, biasanya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data, supaya data yang terkumpul tidak hilang saat dibutuhkan nanti; dan
3. Memelihara rangkaian bukti, tujuannya agar bisa ditelusuri, dari bukti-bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan, penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Di mana peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan wawancara tertutup. Adapun yang menjadi sumber untuk diwawancarai meliputi:

1. Kepala Bidang tata Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bidang Ogranisasi;
3. Camat Wanayasa;

4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanayasa; dan
5. Sebahagian Masyarakat desa dalam lingkungan Kecamatan Wanayasa, secara sampling.

2. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2011:216) dokumen sebagai sumber data dapat didefinisikan sebagai *record* dan dokumen. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film (selain *record*) yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip, dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah dalam penulisan ini. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2011:217) menyatakan bahwa dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong;
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian;
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada pada konteks;
4. *Record* relative lebih murah dan tidak sukar diperoleh, tapi dokumen harus dicari dan ditemukan;
5. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar

ditemukan dengan teknik kajian ini; dan

6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.

Moleong dalam Ibrahim (2015:95) membagi dokumen menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud dari mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.

2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi adalah selain dokumen pribadi yang dapat dipilah kepada dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan, aturan, disiplin dan gaya kepemimpinan seseorang. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan melalui media massa. Dokumen ini dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan data berupa arsip-arsip serta dokumen pendukung lain yang ada pada Dinas Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah serta bahan-bahan

lainnya yang dirasa perlu dan dapat dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

3. Observasi

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2015:81) observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, hidung, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan objek yang di amati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi atau pengamatan langsung terhadap fokus penelitian, yakni tentang penataan kelembagaan kecamatan. Pengumpulan data dengan observasi langsung dilakukan secara pengamatan langsung dengan mata tanpa bantuan alat lain. Pengamatan langsung terbagi dua, yaitu:

1. Pengamatan secara langsung dengan tinjauan kelapangan, yang diamati di antaranya adalah adanya penyempurnaan dukungan sarana prasarana, yang kedua pengamatan terkait dengan kehadiran aparatur kecamatan yang sebelumnya kurang disiplin, setelah penataan kelembagaan aparatur kecamatan menjadi lebih disiplin terutama disiplin waktu kerja.
2. Pengamatan tidak langsung diantaranya yang saya amati adalah dengan mengamati hasil-hasil kerja aparatur dan dokumentasi, buku-buku dan dokumen lainnya yang terkait penataan kelembagaan.

Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Mulyadi (2014:183) "Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar".

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Mulyadi (2014:183) menyatakan bahwa "Analisis data merupakan proses yang merinci suatu kegiatan secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide), seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis".

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data digunakan untuk menarik simpulan dari permasalahan yang ada melalui berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Dengan adanya analisis data, data yang dikumpulkan tersebut dapat diberi arti dan makna sehingga berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011:248) menyatakan bahwa: Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

KONDISI UMUM KECAMATAN WANAYASA

Kondisi Geografis

Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Wanayasa

berada pada ketinggian berkisar 500-700 meter dari permukaan laut dan merupakan wilayah daratan wilayah daratan yang terdiri dari tanah darat 23.282 dan tanah sawah 558 Ha dengan rata-rata curah hujan 351,13 mm/tahun. Adapun secara administratif Kecamatan Wanayasa dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Babakancikao dan Kec. Pondoksalam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kiarapedes Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Bojong.

Kecamatan Wanayasa terdiri dari 15 Desa dan terbagi atas 33 Dusun, 60 Rukun Warga dan 176 Rukun Tetangga.

Kondisi Demografis

Rincian jumlah penduduk di Kecamatan Wanayasa untuk masing-masing desa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta per bulan Mei 2015 sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Agama

Kehidupan beragama di Kecamatan Wanayasa dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan adanya sikap toleransi yang tinggi dan saling menghormati antara pemeluk agama dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya. Masyarakat Kecamatan Wanayasa hampir 99% mayoritas beragama Islam. Hal ini tidak menjadi suatu hambatan bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadahnya, karena adanya upaya dari aparat Desa dan kecamatan serta para ulama dan pembina agama lainnya dalam menuntun dan membina serta mengembangkan toleransi kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Wanayasa.

Tabel 1
Data Statistik Penduduk Kecamatan Wanayasa Tahun 2015

No	Desa	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L + P	Jumlah hak pilih	Jumlah wajib KTP
1.	Nangerang	626	957	932	1.889	1.364	1.403
2.	Simpang	581	921	863	1.784	1.295	1.366
3.	Sakambang	512	731	721	1.452	1.043	1.073
4.	Nagrog	781	1.188	1.103	2.291	1.643	1.672
5.	Cibuntu	482	754	710	1.464	1.043	1.053
6.	Sumurugul	595	864	793	1.657	1.263	1.294
7.	Raharja	451	680	660	1.340	974	987
8.	Wanayasa	1.811	2.554	2.467	5.021	3.659	3.793
9.	Babakan	1.313	1.664	1.588	3.252	2.444	2.642
10.	Wanasari	1.198	1.728	1.599	3.327	2.368	2.476
11.	Legokhuni	864	1.296	1.147	2.443	1.703	1.839
12.	Ciawi	924	1.393	1.296	2.689	1.925	2.024
13.	Sukadami	1.120	1.688	1.625	3.313	2.366	2.465
14.	Tar. Tonggoh	1.146	1.704	1.633	3.337	2.367	2.449
15.	Tar. Tengah	1.154	1.737	1.553	3.290	2.305	2.432
JUMLAH		13.558	19.859	18.690	38.549	27.762	28.968

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa.

Tabel 2
Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Wanayasa Tahun 2015

No	Desa	Mesjid	Mushola	Majlis Ta'Lim	Imam	Muadzin	Guru Ngaji
1	WANAYASA	2	17	14	23	20	19
2	BABAKAN	5	9	7	9	9	8
3	SUMURUGUL	2	11	8	5	4	16
4	CIBUNTU	5	10	8	17	10	15
5	RAHARJA	2	2	5	13	14	10
6	SIMPANG	4	8	11	24	24	27
7	NAGROG	6	22	8	10	13	32
8	SAKAMBANG	3	18	6	3	3	32
9	NANGERANG	4	6	7	8	9	12
10	WANASARI	3	18	18	11	3	26
11	LEGOKHUNI	4	12	6	30	21	15
12	SUKADAMI	2	11	10	13	14	12
13	CIAWI	2	11	7	22	17	50
14	TARTONG	2	17	15	5	5	9
15	TARTENG	3	8	6	25	22	20
Jumlah		49	180	136	218	188	303

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa

Tabel 3
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Wanayasa

No	Desa	Posyandu	Praktik Dokter	Mantri	Bidan Desa	Paraji	Tukang urut
1	WANAYASA	5	2	1	1	-	7
2	BABAKAN	3	-	1	1	2	3
3	SUMURUGUL	2	-	-	1	2	5
4	CIBUNTU	2	-	-	1	2	5
5	RAHARJA	2	-	1	1	2	21
6	SIMPANG	3	-	-	1	3	17
7	NAGROG	3	-	-	1	2	10
8	SAKAMBANG	4	-	-	1	1	9
9	NANGERANG	4	-	1	1	2	3
10	WANASARI	4	-	1	1	2	9
11	LEGOKHUNI	3	-	-	1	4	15
12	SUKADAMI	3	1	1	1	1	8
13	CIAWI	3	-	-	1	3	5
14	TARTONG	4	1	1	1	1	1
15	TARTENG	5	-	-	1	2	10
Jumlah		54	4	7	15	28	128

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa.

Tabel 4
Jumlah Tenaga Pengajar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Wanayasa

No.	Desa	TK	SD	SLTP	SLTA
1	WANAYASA	27	30	75	15
2	BABAKAN	7	15	5	-
3	SUMURUGUL	3	13	11	-
4	CIBUNTU	-	22	-	-
5	RAHARJA	3	20	-	-
6	SIMPANG	4	9	-	-
7	NAGROG	6	28	83	43
8	SAKAMBANG	-	14	-	-
9	NANGERANG	8	16	-	-
10	WANASARI	18	14	3	23
11	LEGOKHUNI	8	17	-	-
12	SUKADAMI	14	12	35	15
13	CIAWI	18	26	16	-
14	TARTONG	5	45	-	-
15	TARTENG	4	17	-	-
Jumlah		125	298	228	96

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa.

Tabel 5
Jumlah Sarana dan Pelaku Usaha di Kecamatan Wanayasa

No	Desa	Penggilingan Padi	Penggergajian Kayu	Ind. Anyaman	Ind. Mamin	Ind. Penyulingan	Ind. Pakaian
1	WANAYASA	3	1	2	37	1	-
2	BABAKAN	1	2	-	5	2	1
3	SUMURUGUL	2	-	2	5	1	1
4	CIBUNTU	2	-	2	4	-	6
5	RAHARJA	1	3	1	7	2	-
6	SIMPANG	3	2	1	3	-	1
7	NAGROG	3	1	45	20	-	10
8	SAKAMBANG	6	2	40	2	2	4
9	NANGERANG	3	1	-	2	-	8
10	WANASARI	2	1	1	15	-	1
11	LEGOKHUNI	2	3	-	21	1	-
12	SUKADAMI	3	2	1	10	-	1
13	CIAWI	3	-	-	-	1	-
14	TARTONG	4	-	-	17	-	-
15	TARTENG	3	1	-	6	-	-
Jumlah		41	19	95	154	10	33

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa

Tabel 6
Daftar Pelaku Usaha di Kecamatan Wanayasa

No	Desa	Ind. Ayam Ras	Rumah makan	Toko Grosir	Warung	Bengkel Mobil	Bengkel Motor
1	WANAYASA	7	3	3	134	5	10
2	BABAKAN	1	4	20	42	1	6
3	SUMURUGUL	10	-	2	29	-	1
4	CIBUNTU	4	-	-	31	-	1
5	RAHARJA	3	-	1	26	-	1
6	SIMPANG	2	-	3	-	-	2
7	NAGROG	1	1	4	40	-	4
8	SAKAMBANG	2	-	-	34	-	-
9	NANGERANG	3	2	-	3	1	2
10	WANASARI	2	4	2	57	2	7
11	LEGOKHUNI	-	-	1	68	3	5
12	SUKADAMI	-	8	2	80	2	4
13	CIAWI	-	-	-	28	-	-
14	TARTONG	1	1	2	112	-	6
15	TARTENG	2	1	-	28	-	1
Jumlah		38	24	40	712	9	40

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa

Tabel 7

Daftar Pelaku Usaha Industri di Kecamatan Wanayasa

No	Desa	Dealer Mobil	Dealer Motor	Ind. Mebel	Ind. Batako	Tower	FC
1	WANAYASA	-	4	-	2	3	3
2	BABAKAN	-	1	1	3	1	1
3	SUMURUGUL	-	-	-	1	-	-
4	CIBUNTU	-	-	1	1	1	-
5	RAHARJA	-	-	3	2	-	1
6	SIMPANG	-	-	1	1	1	1
7	NAGROG	-	-	1	3	-	2
8	SAKAMBANG	-	-	-	1	-	-
9	NANGERANG	-	-	2	2	-	-
10	WANASARI	1	2	3	1	3	2
11	LEGOKHUNI	-	-	-	5	1	-
12	SUKADAMI	-	2	2	2	2	1
13	CIAWI	-	-	-	-	-	-
14	TARTONG	-	-	4	1	2	-
15	TARTENG	-	-	3	1	3	-
Jumlah		1	9	20	26	14	8

Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa

Kondisi Fasilitas Umum

Di kecamatan terdapat fasilitas umum atau instansi milik pemerintah yang bertugas melayani kepentingan masyarakat. Tempat-tempat pelayanan masyarakat tersebut antara lain:

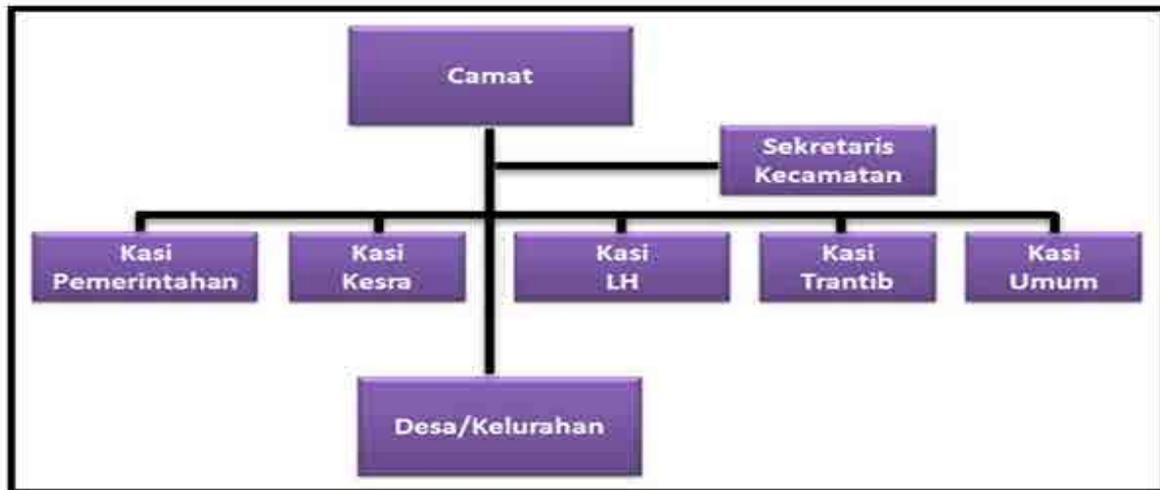
1. Kantor Kecamatan merupakan tempat kerja kepala wilayah kecamatan atau camat beserta perangkat kecamatan lainnya.
2. Kepolisian Sektor merupakan tempat kerja kepala kepolisian sektor atau kapolsek beserta jajarannya.
3. Puskesmas bertugas melayani kesehatan masyarakat sehingga taraf kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat. Puskesmas biasanya dipimpin oleh kepala dinaskesehatan atau dokter yang ditunjuk pemerintah yang dibantu oleh beberapa petugas lainnya.
4. Di kecamatan biasanya ada bank pemerintah yang melayani kepentingan

masyarakat. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai hal seperti tabungan, pinjaman, dan sebagainya.

5. Komando Rayon Militer dipimpin oleh Komandan Rayon Militer (Danramil). Komando Rayon Militer bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan baik dari dalam lingkungan maupun dari luar daerahnya.

Kabupaten Purwakarta, dalam penataan kelembagaan kecamatan dan kelurahan serta desa dalam lingkungan Kabupaten Purwakarta, membuat kebijakan dengan menseragamkan infrastruktur gedung kantor kecamatan, kantor desa dan kelurahan.

Salah satu Kecamatan yang mengenai dampak kebijakan yang diambil adalah Kecamatan Wanayasa, salah satu perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta.



Gambar 1.
Struktur Kecamatan Wanayasa
 (Sumber: Kantor Kecamatan Wanayasa Tahun 2015)

Banyak perubahan yang dilakukan, dampak yang sangat strategis adalah pada aspek pelayanan kepada masyarakat, di mana pelayanan terpadu satu pintu, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kepuasan yang sangat besar sekali. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Visi dan misi kecamatan, yaitu:

- VISI
 Mewujudkan Kecamatan Wanayasa yang mampu memberikan pelayanan prima dan amanah menuju masyarakat madani.
- VISI
 Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan dan pengelolaan ketersediaan sarana dan prasarana.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Camat Wanayasa dan jajarannya dapat dijelaskan sebagai berikut..

Sebelum dilakukan penataan kelembagaan, kondisi pelayanan publik, dirasakan kurang kondusif, di mana tata ruang untuk bekerja, sangatlah tidak nyaman, dan penataannya kurang baik, sehingga untuk melayani masyarakat dirasakan kurang

maksimal, dan masyarakat yang datang untuk membutuhkan pelayanan dirasakan sangat berkurang, kebanyakan dari mereka banyak yang menggunakan jasa pihak lain untuk mengurus urusannya dalam rangka membutuhkan dokumen kependudukan bagi dirinya dan keluarganya atau untuk memperoleh pelayanan lainnya.

Kondisi ini berdampak tidak adanya motivasi kerja jajaran aparatur kecamatan. Sehingga melihat kondisi yang kurang kondusif ini, Camat selaku pimpinan kantor kecamatan yang bertanggung jawab, atas kondisi pelayanan ini melakukan langkah-langkah perbaikan dan terobosan-terobosan kebijakan dengan dan atas seijin Bupati Purwakarta melakukan penataan kelembagaan, dan bertepatan dengan hal tersebut Bupati Purwakarta, sedang melakukan penataan kelembagaan di seluruh kantor-kantor kecamatan dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta, baik penataan secara kelembagaan dengan membuat standarisasi kantor-kantor kecamatan dan tata ruang kerja aparatur kecamatan, juga melakukan penataan sumberdaya aparatur secara kelembagaan.

Khususnya di bidang pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang kependudukan, dilakukan kebijakan jemput bola, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Kecamatan

dalam lingkungan Kabupaten Purwakarta dan Desa-desanya di dalam lingkungan kecamatan untuk bekerja sama melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi secara langsung secara bergantian dari desa-kedesa setiap minggunya untuk melayani masyarakat di bidang kependudukan. Khususnya di Kecamatan Wanayasa, di mana jajaran aparatur kecamatan bekerja sama dengan aparatur dinas Kependudukan melakukan pelayanan jemput bola kedesa-desanya setiap minggunya secara bergantian dengan dibuatkan jadwal kerja yang sangat jelas, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan untuk memperoleh dokumen kependudukan. Istilah ini dinamakan program Gempungan “ Sebelum dilakukan program gempungan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dari jumlah kepala keluarga sebanyak 13.558. kepala keluarga, yang memiliki dokumen kependudukan secara benar hanya kurang lebih 50 %, namun setelah dilakukan program gempungan, kepala keluarga yang memiliki dokumen kependudukan mencapai 90 %, dan dari jumlah wajib KTP dan jumlah hak pilih yang memiliki dokumen kependudukan secara lengkap pasca program gempungan sebanyak 90 %, di mana sebelumnya hanya berkisar 55 %, dari jumlah hak pilih sebanyak 27.762 orang dan wajib KTP sebanyak 28.968 orang, hasil ini sangat efektif sekali dan menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dengan dilakukannya program gempungan (data ini diperoleh hasil wawancara dengan jajaran aparatur kecamatan Wanayasa) pada Tahun 2015 lalu.

Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar kecamatan, dan desa, sebelum dilakukan penataan kelembagaan, masyarakat yang datang ke kantor kecamatan dan desa-desanya di Kecamatan Wanayasa, sangat jarang, bahkan unit pelayanan di Kecamatan banyak didatangi para pihak ke III yang dimintai tolong oleh masyarakat desa, jadi masyarakat desa, menggunakan jasa pihak III lain untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan, bahkan ada keterlibatan staf kecamatan yang berfungsi menjadi calo atau perantara, hal ini sangat dirasakan tidak efektif, karena apabila

data yang dibawanya tidak lengkap, maka yang bersangkutan harus bolak balik, mendatangi kantor kecamatan, sangat dirasakan tidak efektif sama sekali. Bedanya jika masyarakat datang sendiri, masyarakat akan tau data apa yang kurang, sehingga tidak bolak balik untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Camat Wanayasa dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Wanayasa, kondisi sumberdaya manusia yang melayani di kantor kecamatan juga kurang memiliki kompetensi pada aspek pelayanan prima, dari jumlah pegawai kecamatan yang berjumlah 20 orang, yang memiliki latar belakang pendidikan strata 1 hanya 5 orang, dan yang memiliki pendidikan SLA, berjumlah 10 orang dan sisanya berpendidikan SLTP. Kondisi ini dirasakan sangat sangat tidak memadai, dengan jumlah penduduk kecamatan sebanyak 38.549 jiwa, dan kepala keluarga sebanyak 13.558. KK.

Kondisi tempat bekerja yang tidak nyaman dan kurang layak (tidak memenuhi persyaratan sebagai ruang kantor untuk bekerja, melayani masyarakat.

Melihat kondisi kerja seperti ini, Camat sebagai penanggungjawab secara langsung terkait urusan pelayanan kepada masyarakat, melakukan langkah-langkah dengan:

1. Melakukan penataan kelembagaan baik pembenahan secara fisik, terkait tata ruang untuk pelayanan kepada masyarakat, menata ulang administrasi kecamatan, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing staf kecamatan, di mana ruang tempat pelayanan, yang tidak terganggu dengan ruang kerja administrasi perkantoran kesehariannya;
2. Melakukan peningkatan sumberdaya manusia, dengan mengirimkan tenaga-tenaga muda yang memiliki motivasi untuk bekerja dan masih dapat ditingkatkan lagi kompetensinya dan kemampuannya diikutsertakan dalam diklat singkat di Kabupaten Purwakarta, tentang tata cara pembuatan SOP, pelayanan, administrasi perkantoran yang benar, dan pengelolaan keuangan serta mengikuti berbagai

penyuluhan tentang kesehatan masyarakat dan sebagainya. Camat berharap dengan dikutsertakannya sebahagian pegawai mengikuti diklat-diklat singkat akan memberikan peningkatan kualitas bagi pegawai kecamatan dan pegawai memiliki kompetensi dalam melayani masyarakat.

3. Khususnya program Gempungan “ yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, terkait dokumen kependudukan, terus dilanjutkan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens tentang pentingnya dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Cara-cara seperti ini sangat dirasakan efektif sekali, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat disekitar desa-desa dan kecamatan wanayasa, mereka rata-rata mengatakan kepuasannya atas apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh Camat dan jajarannya. Tingkat disiplin jajaran kecamatan semakin hari semakin meningkat, pada aspek kehadirannya untuk bertugas di Kantor Kecamatan, bila dibandingkan sebelum dilakukan penataan kelembagaan kecamatan, masyarakat yang berkunjung ke Kantor Kecamatan semakin ramai dan sangat antusias, dikarenakan kantor kecamatan pasca penataan kelembagaan menjadi kantor yang sangat representative, nyaman dan kondusif.
4. Camat juga bersurat kepada Biro Kepegawaian Kabupaten Purwakarta, apabila ada tambahan pegawai untuk kecamatan Wanayasa, dimintakan yang berijazah Strata 1.
5. Setelah melakukan langkah-langkah penataan kelembagaan berdasarkan hasil analisis bahwa adanya perubahan yang signifikan baik pada sistem pelayanan kepada masyarakat maupun tingkat kedisiplinan pegawai kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Wanayasa setelah adanya langkah penataan kelembagaan bahwa tingkat kehadiran

pegawai mencapai 95 % yang sebelumnya rata-rata hanya 70 s.d 80 %, dan pelayanan masyarakat baik pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah diterapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Efektivitas pelayanan yang dilakukan jajaran kecamatan pasca penataan kelembagaan, sangat efektif sekali, di mana selain penataan kelembagaan, juga dilakukan penataan aspek tataruang kantor bagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana dibentuk ruangan pelayanan terpadu secara kelembagaan, pelayanan satu atap yang dilakukan jajaran kecamatan sangat baik, bahkan untuk pelayanan dokumen kependudukan, jajaran kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah membuat kebijakan untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dengan program gempungan dalam arti pelayanan dilakukan dengan menjemput bola, dan ini dirasakan sangat efektif sekali, serta masyarakat tidak membutuhkan biaya sama sekali, karena jajaran aparatur kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memungut biaya pada aspek pelayanan. Sambil melakukan pelayanan kependudukan, Jajaran aparatur melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan secara totalitas, agar kelak disaat dibutuhkan untuk kebutuhan keluarganya dapat dengan mudah dan telah tersedia.

Antusias masyarakat di dalam membutuhkan informasi setiap hari pelayanan dalam seminggu cukup signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program gempungan yang dilakukan jajaran aparatur kecamatan, dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat

dikatakan sangat efektif dan efisien, karena biaya yang dibutuhkan oleh Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat relatif rendah bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai dalam melaksanakan program gempungan.

Sumberdaya manusia yang diikutsertakan dalam pelatihan di Diklat di Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dan memiliki kompetensi yang memadai sebagai jajaran aparatur kecamatan.

Saran

1. Disarankan untuk tetap mempertahankan tingkat efektivitas pelayanan terkait aspek pelayanan di Kecamatan Wanayasa kedepan Pasca Penataan Kelembagaan.
2. Perlu dilakukan peningkatan Sumber daya manusia aparatur secara konsisten dan berkesinambungan, secara terus menerus di Kecamatan Wanayasa.
3. Apabila ada hambatan dalam aspek melakukan pelayanan, upayakan lakukan dengan mengupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 32 Tahun 2004, direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang tugas camat
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

